



ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM: STUDI KASUS TAHAPAN DAN MASALAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Ayatullah Al-Wajid¹⁾, Titi Kadi²⁾

¹⁾²⁾ Pascasarjana UINSI Samarinda

Email: alwajida445@gmail.com¹⁾, titikadi.ibrahim11@gmail.com²⁾

Abstract

This research underscores the importance of strategic policies in formulating the direction of the Islamic education system in the modern era to address global dynamics and technological advances. This study aims to analyze the characteristics of policies in Islamic education, identify the stages and constraints in the decision-making process, and formulate the objectives of these decisions. The research method used was a qualitative approach with a case study design. Data were collected through a literature review, and data analysis techniques were carried out by compiling and structuring policy formulation concepts. The results indicate that the policy decision-making process moves from information gathering to negotiating alternative courses of action, where differences of opinion are then narrowed down to formal decisions. The main challenges identified include the complexity of mapping public problems due to the gap between normative ideals and empirical actual conditions, as well as the risk of dysfunctional conflicts in the involvement of educational elements. Furthermore, the objectives of decision-making in Islamic educational institutions are divided into single objectives (resolving one isolated aspect) and multiple objectives (solving several contradictory problems simultaneously). This study concludes that the formulation of Islamic education policies requires a holistic-systematic framework to produce decisions that are responsive and adaptive to the challenges of the times.

Keywords: *Formulation Analysis, Islamic Education Policy, Decision Making.*

Abstrak

Penelitian ini melatarbelakangi pentingnya kebijakan strategis dalam perumusan arah sistem pendidikan Islam di era modern guna menghadapi dinamika global dan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kebijakan dalam pendidikan Islam, mengidentifikasi tahapan serta kendala dalam proses pengambilan keputusan, serta merumuskan tujuan dari pengambilan keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka (literatur) dan teknik analisis data dilakukan dengan mengompilasi serta menstrukturkan konsep-konsep formulasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan bergerak dari pengumpulan informasi hingga negosiasi alternatif tindakan, di mana diferensiasi pendapat kemudian dipersempit menjadi keputusan formal. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi rumitnya memetakan masalah publik karena adanya kesenjangan antara kondisi ideal normatif dan aktual empirik, serta adanya risiko konflik disfungsi dalam pelibatan unsur pendidikan. Lebih lanjut, tujuan pengambilan keputusan dalam institusi pendidikan Islam terbagi menjadi tujuan tunggal (menyelesaikan satu aspek terisolasi) dan tujuan ganda (memecahkan beberapa masalah yang kontradiktif sekaligus). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan pendidikan Islam memerlukan kerangka berpikir holistik-sistematis agar mampu menghasilkan keputusan yang responsif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Kata kunci: Analisis Formulasi, Kebijakan Pendidikan Islam, Pengambilan Keputusan.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menciptakan individu yang cerdas dalam aspek akademik, tetapi juga yang memiliki karakter dan akhlak mulia. Dalam rangka ini, Al-Qur'an memainkan peran penting sebagai pedoman utama yang memberikan arahan dalam merancang sistem pendidikan yang menyeluruh. Integrasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat membangun sistem pendidikan yang harmonis, yang menyeimbangkan aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Penerapan prinsip-prinsip tersebut relevan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang.

Dalam pendidikan islam, tujuan merupakan acuan dasar dalam membentuk program-program yang akan dijalankan. Segala program yang dibentuk dalam pendidikan islam selalu berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi atau penilaian. Dengan dilakukan suatu evaluasi maka dapat diketahui kekurangan dan kelebihanannya, serta dapat ditentukan langkah berikutnya untuk dapat memajukan dan memperbaiki program-program

Pemerintah menunjukkan kekuasaan otoriter dengan kurang memperhatikan aspirasi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, serta memberikan perhatian yang terbatas terhadap pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah pada Orde Lama dan Orde Baru cenderung lebih fokus pada modernisasi politik dan menunjukkan sikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam. Secara umum, kebijakan awal pada Orde Baru hanyalah kelanjutan dari kebijakan pada Orde Lama, khususnya dalam konteks terhadap pendidikan Islam pada era Orde Baru dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan juga dipengaruhi oleh arus modernisasi dalam konteks pendidikan Islam, serta kecenderungan untuk mengkotomikan pendidikan Islam. pada masa Orde Baru, pendidikan Islam dianggap sebagai entitas terpisah dari sistem pendidikan nasional, yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak dan penggunaannya sebagai alat untuk kepentingan penguasa.

Kebijakan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai sasaran pendidikan, baik dalam konteks institusional maupun nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara moral dan materi, baik secara fisik maupun spiritual. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang memiliki martabat. Pendidikan ini diarahkan untuk memberdayakan peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Moh. Ahyan Yusuf Sya'bani, bahwa Kebijakan pendidikan harus adaptif terhadap era globalisasi yang mencakup semua aspek kehidupan. Kebijakan yang tidak responsif dan tidak berorientasi pada arah yang jelas dapat membuat pendidikan kehilangan arah dalam menghadapi perubahan budaya yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kebijakan yang responsif, adaptif, dan sesuai dengan keadaan nyata perlu dirumuskan secara bersamaan dan menyeluruh.

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka timbul permasalahan-permasalahan pendidikan yang kompleks. Berbagai persoalan pendidikan muncul dan berkembang seperti rendahnya kualitas pendidikan secara umum, masalah anggaran pendidikan, tidak meratanya kesempatan pendidikan, dan mahal biaya pendidikan. Dan lebih khusus lagi, problematika jugaterjadi pada profesi keguruan yang merupakan ujung tombak dunia pendidikan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain rendahnya kualitas guru, tidak profesional dalam melaksanakan tugas keguruan, kurangnya

penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, dan tingkat kesejahteraan guru yang relatif masih rendah.

Lebih ironi lagi, Indonesia merupakan negara yang mayoritas Muslim. Akan tetapi dalam hal pendidikan, pendidikan Islam tidak menjadi mayoritas dalam kedudukan pendidikan nasional. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam sistem pendidikan nasional. Padahal, pendidikan apapun itu, baik pendidikan nasional ataupun pendidikan Islam, pada hakikatnya pendidikan adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia, memanusiakan manusia agar benar-benar mampu menjadi khalifah di atas bumi ini.

Dari banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam Pendidikan Islam, pemakalah akan membahas tentang Analisis formulasi kebijakan Pendidikan Islam: studi kasus tahapan dan masalah dalam pengambilan Keputusan.

II. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka. Menurut Sugiyono, tinjauan pustaka adalah studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data, informasi, dan teori melalui dokumentasi tertulis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama makalah ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep teoritis mengenai definisi pendidikan dan pembelajaran, karakteristik proses yang efektif, dan penentu keberhasilan, berdasarkan literatur ilmiah yang valid.

Data yang digunakan dalam artikel ini seluruhnya merupakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pelacakan, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat bahan pustaka yang berkaitan dengan topik pendidikan dan pembelajaran.

Data teoritis yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi dan metode interpretatif deskriptif. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan, triangulasi sumber digunakan dengan membandingkan berbagai perspektif ilmiah dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Dalam Pendidikan Islam Kebijakan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang samasama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 1999). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Kebijakan-kebijakan strategis pendidikan dibutuhkan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Keterlibatan unsur pendidikan dalam perumusan kebijakan menjadi nilai tambah baik terhadap kualitas kebijakan yang dirumuskan maupun motivasi dalam melaksanakan kebijakan. Namun disamping itu keterlibatan unsur pendidikan dalam perumusan kebijakan juga mempunyai sisi negatif diantaranya adalah potensi konflik yang bisa saja fungsional ataupun disfungsional. Kebijakan merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah lembaga pendidikan, karena menyangkut kepentingan warga dalam lembaga pendidikan. Sebelum di implementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami terminasi karena gagal mencapai maksud dan tujuan.

Kebijakan menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep ini sangat luas dan didasarkan pada apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah Negara. Namun ketika konsep ini kita tarik pada tataran lembaga pendidikan maka kebijakan dapat dipahami sebagai apapun pilihan pengurus lembaga pendidikan untuk melakukan atau tidak melakukan.

Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai kepada kebijakan yang dipilih. Keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. Pilihan-pilihan ini sering disebut sebagai alternatif kebijakan yang dapat dipilih, yang menurut para pendukung tindakan tersebut dapat disetujui. Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah pembuatan keputusan, maka ada beberapa usul yang akan diterima dan sebagian lagi akan ditolak, dan mungkin usul yang lain akan dipersempit. Pada tahap ini perbedaan pendapat akan dipersempit dan tawar menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, dan kebijakan hanya akan merupakan formalitas.

Pendidikan Islam

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Aspek yang sangat urgen dalam pendidikan adalah belajar (*learning*) dan pembelajaran (*instruction*). Belajar (*learning*) merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.

Pendidikan merupakan sebuah proses pendewasaan manusia (peserta didik) untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Proses interaksi tersebut dilakukan melalui serangkaian latihan dan pengalaman yang dijalani oleh peserta didik. Dalam makna lain, pendidikan bukan hanya sekedar pelaksanaan kebijakan nasional atau sekedar persesuaian nilai-nilai yang ada di masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, pendidikan harus dilihat sebagai salah satu kekuatan sosial yang ikut memberi bentuk, corak, dan arah pada kehidupan masyarakat masa depan.

Pengertian Pendidikan Islam menurut H.M. Arifin adalah suatu proses pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan hamba Allah (anak didik) dengan berpedoman pada ajaran Islam, sedangkan menurut Abdul Munir Mulkhan, mengartikan Pendidikan Islam sebagai suatu kegiatan insaniah, memberi atau menciptakan peluang untuk teraktualkannya akal potensial menjadi akal aktual, atau diperolehnya pengetahuan yang baru dan menurut Taufiq Abdullah dan Sharon Shiddique, mendefinisikan bahwa Pendidikan Islam adalah suatu proses yang komprehensif dari perkembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik.

Menurut para ahli Pendidikan Islam memiliki beberapa tujuan yang dapat digambarkan sebagai berikut: Pendidikan Islam menurut Muhammad Al-Abrasyi memiliki lima tujuan,

yaitu pembentukan akhlak, persiapan kehidupan di dunia dan akhirat, menumbuhkan ruh ilmiah, menyiapkan peserta didik dari segi profesional dan persiapan dalam berusaha untuk mencari rejeki. Pendapat lain disampaikan oleh Ibnu Sina mengenai tujuan Pendidikan Islam mencapai kebahagiaan (sa'adah) secara bertingkat sesuai dengan tingkat pendidikan (kebahagian pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan manusia secara menyeluruh. Tujuan Pendidikan Islam tidak lain merupakan pembentukan nilai-nilai ke-Islaman pada setiap individu dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kebijakan dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan sistematis dalam perumusan kebijakan. Dinamika global, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial-budaya telah menciptakan lapisan permasalahan yang saling terkoneksi dalam sistem pendidikan Islam. Kondisi ini menuntut para pemangku kebijakan untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menstrukturkan masalah secara komprehensif sebelum merumuskan solusi kebijakan yang efektif. Kompleksitas permasalahan dalam kebijakan pendidikan Islam tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial atau solusi yang bersifat reaktif. Setiap masalah dalam pendidikan Islam memiliki akar yang dalam dan terhubung dengan berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, infrastruktur, hingga aspek sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka berpikir yang sistematis untuk memahami dan menstrukturkan problematika yang ada secara holistik.

B. Tahapan dan Masalah Dalam Pengambilan Keputusan

Pengertian Pengambilan Keputusan Pada dasarnya pengambilan keputusan merupakan proses memilih sejumlah alternatif pengambilan keputusan penting bagi pemimpin birokrasi karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Adapun definisi pengambilan Keputusan menurut Salusu (2016:47), adalah “proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi”. Sedangkan Usman (2018:321), mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih sejumlah alternatif. Sedangkan Higgins dalam Salusu (2016:47), mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah kegiatan yang paling dari semua kegiatan karena di dalamnya pimpinan terlibat, dan malahan kata Hoy dan Miskel merupakan pertanggung jawaban utama dari semua administrator melalui proses tempat keputusan-keputusan di buat.

Salah satu kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan Brinckloe (2020), dan sekali keputusan dibuat sesuatu mulai terjadi. Dengan kata lain, keputusan mempercepat diambilnya tindakan, mendorong lahirnya tindakan dan perubahan Hill (2020). Jadi, aturan ini menegaskan bahwa harus ada tindakan, dan tindakan itu tidak dapat ditunda, sekali keputusan dibuat, harus diberlakukan dan jika tidak, sebenarnya ia bukan keputusan, tetapi lebih tepat dinamakan suatu hasrat, niat baik.

Tahapan Dalam Pengambilan Keputusan

Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan tersebut. Unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari pengambilan Keputusan
2. Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah

3. Perhitungan terhadap faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya di luar jangkauan manusia.
4. Sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.

Berikut ini contoh, yang berupa ilustrasi dari unsur-unsur atau komponen-komponen pengambilan keputusan tersebut di atas. Untuk mengembangkan suatu model pengambilan keputusan yang bersifat umum, kita perlu mengadakan identifikasi dan mengambil kategori dari berbagai unsur yang merupakan bagian dari masalah beserta pemecahannya.

- a. **Unsur pertama**, adalah mengetahui lebih dahulu apa tujuan dari pengambilan keputusan itu, misalnya jika anda akan mobil baru, maka anda harus mengetahui lebih dahulu tujuannya, biasanya paling umum adalah tujuan yang bersifat ekonomis.
- b. **Unsur kedua** adalah mengadakan identifikasi alternatif-alternatif yang akan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu perlu kiranya membuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk memilih alternatif.
- c. **Unsur ketiga** adalah perhitungan mengenai faktor-faktor di luar jangkauan manusia. Keberhasilan setiap alternatif keputusan dikaitkan dengan tujuan yang dikehendaki, ini sangat tergantung pada keadaan yang mungkin berada di luar jangkauan manusia.
- d. **Unsur keempat** adalah adanya sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil pengambilan keputusan itu, selanjutnya alternatif-alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu perlu dirinci dengan menggunakan sarana atau alat untuk mengukur yang akan diperoleh atau pengeluaran yang perlu dilakukan dari setiap kombinasi alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu.

Masalah Dalam Pengambilan Keputusan

Pada prinsipnya, masalah muncul apabila ada gap atau kesenjangan antara “*das sollen*” dan “*das sein*” atau perbedaan antara apa seharusnya dengan apa yang tidak seharusnya, antara apa yang dibutuhkan dan apa yang tersedia, antara apa yang diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan. Masalah merupakan suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal menghasilkan situasi yang membingungkan Vardiansyah (2008). Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari “ada” saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan.

Untuk menentukan permasalahan pengambilan keputusan bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah, oleh karena biasanya muncul pertanyaan bagi orang yang hendak meneliti, yaitu “bagaimana dapat menemukan dan atau menentukan permasalahan pengambilan keputusan” dan bagaimana harus memulainya, serta bagaimana harus menulis permasalahan pengambilan keputusan. Pada hal untuk menemukan masalah pengambilan keputusan sangat mudah yaitu dengan cara mencari gap antara ideal normatifnya dengan aktual empirik sebagai definisi yang telah diuraikan di atas.

Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di atas, bukanlah merupakan sesuatu yang baru karena bukan saja terjadi pada mahasiswa tetapi juga sering muncul pada orang yang menjadi sarjana, atau bahkan guru besar sekalipun menghadapi hal yang sama apabila akan merumuskan permasalahan pengambilan keputusan. Setiap orang yang berhadapan dengan tujuan merumuskan atau menulis suatu permasalahan pengambilan keputusan,

Jenis-jenis Masalah

- a. **Masalah Privat** adalah masalah yang dapat diatasi tanpa mempengaruhi atau melibatkan pemerintah dalam penyelesaiannya. Masalah privat merupakan masalah

pribadi seseorang yang tidak perlu melibatkan orang lain atau pemerintah dalam penyelesaiannya. Jadi masalah pribadi tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengambilan keputusan, yang dapat dijadikan dasar adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik.

- b. **Masalah Publik** adalah masalah yang dapat diselesaikan dengan melalui kebijakan pemerintah. Masalah publik merupakan masalah yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau publik yang penyelesaiannya harus melibatkan orang lain atau pemerintah. Misalnya pelayanan KTP, Surat Nikah, Surat Kematian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan lain-lain. Jadi masalah publik dapat dijadikan dasar untuk melakukan suatu pengambilan keputusan.

C. Tujuan Dari Pengambilan Keputusan

Setiap orang atau organisasi yang akan melakukan pengambilan keputusan selalu memiliki tujuan yang terkait dengan keputusan yang diambilnya, meskipun tujuannya sendiri tidak selalu jelas yang kemudian akan menjadi persoalan tersendiri. Namun demikian, Secara umum, maksud dan tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memecahkan masalah.

Tujuan dari pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. **Tujuan yang bersifat tunggal** yaitu tujuan pengambilan yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah artinya sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Misalnya, masalah yang dihadapi hanya masalah yang menyangkut satu aspek saja yaitu masalah keuangan, maka keputusan yang diambil hanya menyangkut aspek keuangan, Bila masalah keuangan diselesaikan tidak akan menimbulkan akibat lain atau efek sampingan terhadap aspek lain.
- b. **Tujuan yang bersifat ganda** yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradikti

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis teoretis dan studi kasus mengenai formulasi kebijakan pendidikan Islam, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin esensial sebagai berikut:

Karakteristik Proses Pengambilan Keputusan: Perumusan kebijakan dalam lembaga pendidikan Islam bukanlah sebuah tindakan tunggal yang instan, melainkan sebuah rangkaian proses yang bergerak dari pengumpulan informasi komprehensif hingga negosiasi berbagai alternatif tindakan. Proses ini secara sistematis mempersempit diferensiasi pendapat di antara para pemangku kepentingan untuk menghasilkan sebuah keputusan formal yang mengikat.

Kompleksitas Pemetaan Masalah: Hambatan utama dalam tahap formulasi terletak pada rumitnya memetakan masalah publik secara akurat. Hal ini dipicu oleh adanya kesenjangan yang lebar antara kondisi ideal normatif yang diharapkan dengan realitas aktual empirik di lapangan, serta adanya risiko munculnya konflik disfungsional ketika melibatkan berbagai unsur pendidikan.

Dualisme Tujuan Pengambilan Keputusan: Institusi pendidikan Islam dihadapkan pada dua model tujuan pengambilan keputusan, yaitu tujuan tunggal untuk menyelesaikan satu masalah yang bersifat terisolasi, dan tujuan ganda yang menuntut kemampuan aparatur pendidikan untuk memecahkan beberapa masalah yang saling kontradiktif secara simultan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perumusan kebijakan pendidikan Islam sangat bergantung pada penerapan kerangka berpikir yang holistik-sistematis. Pengambil kebijakan dituntut untuk tidak hanya bersandar pada aspek administratif, tetapi juga harus responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial serta kemajuan zaman agar produk kebijakan yang dihasilkan mampu membawa kemajuan nyata bagi mutu pendidikan Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Assegaf, A. R. (2019). *Filsafat pendidikan Islam: Paradigma baru pendidikan hakekat dan sains*. Rajawali Pers.
- Azra, A. (2018). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium ketiga*. Kencana.
- Fadhli, M. (2017). Manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam. *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(1), 59–69.
- Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi kebijakan pendidikan Islam sebagai bagian dari kebijakan publik (Analisis teoretis). *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(11), 86–96.
- Hanafi, H., & Ma'arif, M. A. (2021). Analisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan peluang di era disrupsi. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(2), 145–156.
- Hanifah, N. (2022). Evaluasi kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 5(1), 34–48.
- Karo, T. K. (2019). Pemetaan permasalahan pendidikan Islam di Indonesia dan langkah-langkah mengatasinya. *Jurnal Waraqat*, 4(1), 143.
- Mu'izzuddin, M. (2020). Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan Islam. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 8(2), 1–12.
- Nata, A. (2021). *Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Dari masa klasik hingga era merdeka belajar*. Prenadamedia Group.
- Parawansah, S. H., & Sofa, A. R. (2025). Pendekatan komprehensif berbasis Al-Qur'an dan hadits dalam akademik, tetapi juga yang memiliki karakter dan akhlak mulia (Achmad, 2024). Dalam rangka. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 187–205.
- Pasolong, H. (2023). *Teori pengambilan keputusan* (Ed. ke-1). Alfabeta.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. [*Nama Jurnal Belum Lengkap*], 3(25), 6.
- Sabri, A. (2013). Kebijakan dan pengambilan keputusan dalam lembaga pendidikan Islam. *Al-Ta Lim Journal*, 20(2), 373–379.
- Sari, L. M. (2019). Evaluasi dalam pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 211.
- Sirozi, M. (2015). *Politik kebijakan pendidikan di Indonesia: Peran dan kontribusi pendidikan Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Susanto, D., Su'aidi, & Widdah, M. E. (2023). Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 96–104.
- Tolchah, M. (2016). *Dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Umar, M. (2019). Strategi pengambilan keputusan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)*, 4(2), 112–125.
- Warlizasusi, J., dkk. (2016). *Analisis kebijakan pendidikan Islam* (F. Harahap & E. K. Harahap, Ed.; Ed. ke-1). Penerbit Buku Literasiologi.



Yana, H. H., & Susanti, L. (2024). Analisis kebijakan pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan era globalisasi di madrasah. *Al-Bustan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–13.